

**PERATURAN DESA MULYOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA MULYOREJO KECAMATAN TAMBAKREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN TAMBAKREJO
DESA MULYOREJO
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN TAMBAKREJO
DESA MULYOREJO
ALAMAT : JL. MULYOAGUNG NO.1 KODE POS 62166
Email : mulyorejo.online@gmail.com | Website : mulyorejotbk-bjn.desa.id

Mulyorejo, 31 Desember 2024

Kepada
Yth. Camat Tambakrejo

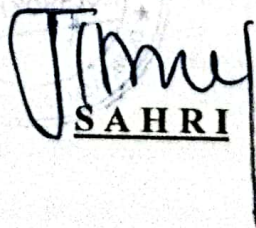
Di
TAMBAKREJO

SURAT PENGANTAR

Nomor : 141 /~~1584~~ 412.421.15 / XII /2024

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Peraturan Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor : 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.	I (satu) Berkas	Demikian untuk menjadikan periksa

KEPALA DESA MULYOREJO


SAHRI



DESA MULYOREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DESA MULYOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MULYOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MULYOREJO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Revisi Kedua dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
- 02 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
- 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024;
- 14 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 15 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- 16 Surat Edaran Kabupaten Bojonegoro Nomor 140/2169/412.211/2024 tentang Prognosa Besaran ADD, BHPD dan BHRD Pada APBD TA 2025;
- 17 Surat Keputusan Camat Tambakrejo Nomor 188/33/KEP/412.421/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi R APBDes Tahun Anggaran 2025;
- 18 Peraturan Desa Mulyorejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 19 Peraturan Desa Mulyorejo Nomor 6 tahun 2019 tentang RPJMDes Tahun 2020-2026;
- 20 Peraturan Desa Mulyorejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKPDes Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MULYOREJO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 , dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	Rp	125.005.500,00
1.2.	Transfer	Rp	3.766.821.220,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	2.249.635,00
	Jumlah Pendapatan	Rp	3.894.076.355,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.501.939.435,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.892.002.120,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	321.485.950,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	82.500.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	118.000.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	3.915.927.505,00
	Surplus/Defisit	Rp	(21.851.150,00)
3.	Pembiayaan Desa		0,00
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	21.851.150,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan	Rp	21.851.150,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa MUYOREJO.

Ditetapkan di : Mulyorejo
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA,

Ttd.

SAHRI

Diundangkan di : Mulyorejo
Pada tanggal : 31 Desember 2024

Sekretaris Desa



TUTU ARISONA, S.Pd

BERITA DESA MUYOREJO TAHUN 2024 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MUYOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.005.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.766.821.220,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.249.635,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.894.076.355,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	887.010.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.102.828.385,00	
5.3.	Belanja Modal	1.808.088.320,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.915.927.505,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.851.150,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.851.150,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	21.851.150,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	21.851.150,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MUYOREJO, 31 Desember 2024
 KEPALA DESA
 MUYOREJO
 SAHRI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MULYOJEJO
 TAHUN ANGGARAN 2025

enis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.005.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.766.821.220,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.249.635,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.894.076.355,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.501.939.435,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.220.492.435,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	83.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	83.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	564.975.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	564.975.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.525.800,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.525.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	62.249.635,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.249.635,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	139.200.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Operator Desa	19.500.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	137.810.000,00	ADD, PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	137.810.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan Staf Desa	69.600.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.600.000,00	
1.1.94		Jasa Pungut dan Stribusi PBB	5.932.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.932.000,00	
1.1.95		Kendaraan Operasional Pemerintah Desa, dll	9.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	224.720.200,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.520.200,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.520.200,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	212.200.000,00	ADD, PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	199.400.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.600.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.600.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37.022.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	5.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.022.100,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.022.100,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.104.700,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	3.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	2.604.700,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.604.700,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1 5 06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.892.092.120,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	75.200.000,00	
2 1 01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	51.200.000,00	DDS
2 1 01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	51.200.000,00	
2 1 02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	24.000.000,00	DDS
2 1 02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2 1 02	5.3	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	101.720.000,00	
2 2 01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	16.920.000,00	DDS
2 2 01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.920.000,00	
2 2 02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	73.400.000,00	DDS
2 2 02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	73.400.000,00	
2 2 09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	11.400.000,00	DDS
2 2 09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.639.082.120,00	
2 3 01		Pemeliharaan Jalan Desa	100.000.000,00	DDS
2 3 01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2 3 10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.331.182.120,00	ADD, DDS, PBK
2 3 10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.914.000,00	
2 3 10	5.3	Belanja Modal	1.312.268.120,00	
2 3 12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	207.900.000,00	DDS
2 3 12	5.3	Belanja Modal	207.900.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	65.000.000,00	
2 4 01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2 4 01	5.3	Belanja Modal	20.000.000,00	
2 4 06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	5.000.000,00	DDS
2 4 06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2 4 15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	40.000.000,00	DDS
2 4 15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.000.000,00	
2 6 02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	11.000.000,00	DDS
2 6 02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>321.485.950,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	169.440.000,00	
3 1 01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	30.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	134.640.000,00	DDS, PBK
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.640.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.800.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	114.045.950,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	72.494.750,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.494.750,00	
3.2.93		Penyelenggaraan kegiatan pelestarian adat/kebudayaan/sedekah bumi/grebek berkah/haul bersekala lokal	31.551.200,00	PBH
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.551.200,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>82.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	50.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	45.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	22.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	17.500.000,00	PBH
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>118.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.915.927.505,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(21.851.150,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	21.851.150,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	21.851.150,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



MULYOOREJO, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

SAHRI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MULYORWJO KECAMATAN TAMBAKREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

Alamat : Jl. Mulyo Agung No. 01 , Kode Pos 62166.

MULYOREJO

Mulyorejo, 31 Desember 2024

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa Mulyorejo

di-
MULYOREJO

SURAT PENGANTAR

Nomor : 5 / Sekr.BPD / XII /2024

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Keputusan BPD Nomor: 5 Tahun 2024 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Mulyorejo Kecamatan Kabupaten Bojonegoro Nomor: ... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.	I (satu) Berkas	Demikian untuk dijadikan periksa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MULYOREJO KECAMATAN TAMBAKREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MULYOREJO KECAMATAN TAMBAKREJO
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 5 TAHUN 2024**

ATAS

**RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR ... TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
DESA MULYOREJO
KECAMATAN TAMBAKREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYOREJO

- Menimbang** : Bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Peraturan Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025 telah memenuhi syarat sesuai Pasal 39 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), maka perlu ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang sebagai dasar penetapannya dengan Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa yang di tuangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Revisi Kedua dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2023;
 22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017 Tentang

- Pengolaan Tanah Desa;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;
 26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
 27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pemerintah Desa;
 28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
 29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standart Biaya Umum (SBU);
 31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 32. Surat Edaran Kabupaten Bojonegoro Nomor Nomor 140/2169/412.211/2024 tentang Prognosa Besaran ADD, BHPD dan BHRD Pada APBD TA 2025;
 33. Peraturan Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;
 34. Peraturan Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMDesa;
 35. Peraturan Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKP Desa untuk Tahun Anggaran 2025;
 36. Keputusan Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Peraturan Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2024, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor : Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
- KEDUA** : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor: Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mulyorejo
Pada Tanggal : 31 Desember 2024

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MULYOOREJO**



BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MULYOOREJO KECAMATAN TAMBAKREJO KABUPATEN BOJONEGORO
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Mulyorejo telah diadakan Rapat BPD yang membahas tentang Rancangan Peraturan Desa Mulyorejo Nomor:... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 , yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris , seluruh Anggota BPD, dan Tim Penyusun APBDes sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut menyetujui Rancangan Peraturan Desa Mulyorejo Nomor: Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa	Rp	125.005.500,00
1.2. Transfer	Rp	3.766.821.220,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	2.249.635,00
Jumlah Pendapatan	Rp	3.894.076.355,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.501.939.435,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.892.013.000,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	321.485.900,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	82.500.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	118.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	3.915.938.335,00
Surplus/Defisit	Rp	(21.861.980,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	21.861.980,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan	Rp	21.861.980,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Demikian berita acara ini dibuat agar dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mulyorejo, 31 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

DESA MULYOOREJO



DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYOOREJO
KECAMATAN TAMBAKREJO
 Selasa, 31 Desember 2024

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PURYONO	Ketua Merangkap Anggota	
2.	IMAM MALIK	Wakil Ketua Merangkap Anggota	2) 
3.	SADIKUN S.Pd	Sekretaris Merangkap Anggota	
4.	SUTRISNO, S.Pd	Seksi Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Merangkap Anggota	4) 
5.	SAIFUDIN	Seksi Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Merangkap Anggota	5) 
6.	JUKI KASNANTO	Anggota	6) 
7.	PUJI RAHAYU	Anggota	7) 
8.	SYAHRUL FAJAR PUNGKY	Anggota	8) 
9.	IWAN SUHENDRA	Anggota	9) 

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 9 Orang.
2. Hadir : Orang.
3. Tidak Hadir : Orang.
4. Quorum : Memenuhi Quorum.

Mulyorejo, 31 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MULYOOREJO

